

# Komersialisasi dan Diferensiasi Pada Sebuah Desa Perbatasan Sumatera Barat, 1973-1998\*

Oleh  
Nopriyasman dan Gusniarti\*\*

## ABSTRACT

Laporan penelitian ini menjelaskan perkembangan kawasan perbatasan bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat, khususnya pada masalah komersialisasi dan diferensiasi sosial penduduk Pedesaan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Apakah akumulasi dan akses terhadap tanah berpengaruh pada polarisasi masyarakat perkebunan, sehingga melahirkan petani komersial.

Perubahan kehidupan masyarakat pedesaan dengan sistem pemerataan tradisional melalui pola kepemilikan komunal mulai bergeser kearah kepemilikan dan penguasaan harta individual. Petani muncul sebagai "petani rasional" yang mendifersifikasikan diri untuk kepentingan komersial, hubungan saling mengun-tungkan, kerja atas upah berupa uang, dan bagi hasil. "Kebun baru" meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi ternyata juga memunculkan kelompok petani kaya yang beruntung. Komersialisasi desa juga semakin nyata dengan lancarnya komunikasi dan transportasi, sehingga gaya hidup kota juga merambah pedesaan.

## I. PENDAHULUAN

Ekonomi pedesaan dalam dua dasawarsa terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan : produksi pertanian atau perkebunan mengalami peningkatan, sehingga timbul sifat komersial dan terjadinya diferensiasi masyarakat pedesaan. Sifat pertanian pedesaan berubah dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang sesuai dengan standar ilmu pertanian. Untuk itu untuk daerah Sumatera Barat, kawasan bagian Selatan adalah salah satu contohnya. Sebelum daerah ini dibuka menjadi kawasan perkebunan, karet sejak tahun 1973 dan Sawit sejak tahun 1990-an, cara-cara berkebun petani belumlah berorientasi pada peningkatan kualitas dan jumlah produksi (Nopriyasman dan Syafrizal ; 1999, 13). Akan tetapi setelah petani menjadi peserta Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB), soal pemeliharaan, penyadapan, peremajaan, sampai kepada budi daya pertanian mulai mereka terapkan di kebun miliknya. Perubahan yang juga cukup mencolok adalah "mengkotanya pedesaan", maka gaya hidup kota dan pedesaan mewarnai pola kehidupan sehari-harinya. Lebih jauh gejala komersialisasi dan diferensiasi sosial menyatu pula di dunia pedesaan.

Proses pemencaran diferensiasi keluarga petani di desa-desa perbatasan Sumatera Barat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi perkebunan orde

\*Dibiayai oleh Dana SPP/DPP Universitas Andalas tahun anggaran 2001. Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Penelitian Nomor : 65/LP-UA/SPP-DPP/K/V/2001

\*\*Peneliti adalah Staf Pengajar dan Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Sastra universitas Andalas Padang



baru sejak tahun 1970-an, yaitu: munculnya petani yang memiliki kebun karet yang luas dan petani kecil atau buruh tani. Salah satu faktor sejarah yang mendorong berkembangnya perbedaan luas pemilikan lahan kebun (karet) di Kenagarian Koto Baru adalah pencairan sistem pemilikan tanah komunal (tanah persukuan atau kaum). Kondisi tersebut berarti telah terjadi diferensiasi pelapisan penguasaan tanah secara riil masa orde baru (Nopriyaman, et.al., 1997, 36). Masalah tanah dan produksi pertanian ini pula yang menjadi salah satu ciri dari perubahan ekonomi masyarakat pedesaan perbatasan, khususnya Nagari Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Penelitian ini mencoba membahas sejarah munculnya komersialisasi dan diferensiasi penduduk pedesaan perbatasan Sumatera Barat. Oleh sebab itu, akan tergambar pula pelapisan sosial ekonomi yang jelas di antara penduduk desa sehubungan dengan luas tanah dan kebun yang dikuasai keluarga petani, cara penguasaan tanah, dan dampak sosial lainnya.

## II. PERUMUSAN MASALAH

Persoalan pokok yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini pada dasarnya berkisar pada : Bagaimanakah pertumbuhan penduduk dan perubahan pola distribusi pemilikan tanah di Koto Baru ? Apakah yang menjadi dasar diferensiasi sosial di daerah pedesaannya ? Bagaimana pula polarisasi masyarakat perkebunan kawasan itu ? Mengapa komersialisasi dan diferensiasi terjadi dalam masyarakat perkebunan tersebut ?

Penelitian ini mempunyai batasan spasial Kecamatan Koto Baru, khususnya Kenagarian Koto Baru. Daerah Kenagarian tersebut meliputi : Koto Salak, Seberang Pirako, Pasar Koto Baru, Koto Koto Baru, dan Ampang Kuranji (*Kecamatan Koto Baru Dalam Angka Tahun 1994*). Kawasan pedesaan Koto Baru masuk daerah Kabupaten Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi. Meskipun demikian sepanjang berkaitan dengan penelitian, maka desa-desa sekitar juga akan disinggung secara sepintas.

Sedangkan batasan temporal diambil tahun 1973-1998. Alasannya tahun 1973 dimulai rencana perkebunan rakyat yang ditandai adanya musyawarah desa untuk penyerahan tanah ulayat kaum masyarakat desa. Penelitian direncanakan selama 25 tahun yaitu sampai tahun 1998, masa akhir orde baru, untuk melihat bahwa sejak kebun karet menghasilkan diferensiasi sosial ekonomi mulai terlihat. Sekaligus mempengaruhi gaya hidup masyarakat pedesaannya.

## III. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian desa yang menggunakan pendekatan sejarah di Indonesia dapat kita temui dalam tulisan Frans Husken, *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* (Jakarta: Grasindo, 1998). Tulisan ini menginformasikan bahwa pendekatan teknologi memang telah meningkatkan produksi beras, sehingga tercapai swasembada pangan tahun 1984/1985. Akan tetapi ternyata di balik keberhasilan itu menyembul persoalan baru, karena yang lebih diuntungkan dengan "revolusi hijau" justru para petani kaya. Sedangkan petani kecil atau buruh tani tersingkir dari desa, sehingga timbul pula ketegangan sosial di lingkungan pedesaan.

Hiroyosi Kano, Frans Husken dan Djoko Surjo (Eds.), *Di Bawah Asap Pabrik Gula : Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996), menggambarkan kisah modal besar memasuki daerah pedesaan Comal yang merapuhkan ekonominya dan memperkuat kedudukan pedagang perantara dari kota. Masuknya modal asing cenderung mengubah pola



pengusaan tanah sehingga menambah stratifikasi sosial masyarakat. Hiroyosi Kano melihat bahwa di pedesaan Comal telah terjadi diferensiasi kehidupan ekonomi petani. Dalam tulisannya yang lain, *Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa* (1984), menitik beratkan pada diferensiasi penduduk pedesaan, terutama berhubungan dengan polarisasi luas pemilikan atau pengusaan tanah. Begitu juga D.H. Burger melihat perubahan sosial masyarakat desa atas dasar masalah perubahan pemilikan dan penguasaan atas tanah. Tulisan Burger tersebut berjudul *Desa Ngablak (Kabupaten Pati) pada tahun 1869 dan 1928*.

Rangkaian tulisan tersebut menginformasikan bahwa keberadaan suatu pedesaan tak terlepas dari hasil pertumbuhan desa tersebut, namun masalah diferensiasi sosial desa yang menjadi topik penelitian ini belumlah terungkap. Atas dasar itu penelitian ini menjadi relevan diangkat kepermukaan.

#### IV. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Mempelajari pertumbuhan penduduk dan perubahan pola distribusi pemilikan tanah di Kenagarian Koto Baru (desa-desa perbatasan bagian Selatan Sumatera Barat) selama orde baru.
2. Mempelajari dasar-dasar diferensiasi sosial di daerah perbatasan.
3. Mempelajari perkembangan komersialisasi dan diferensiasi sosial dalam masyarakat perkebunan.

#### V. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penampilan profil desa perbatasan, khususnya pada masalah diferensiasi sosial dalam perspektif kesejarahan, tidak saja menambah literatur kajian tentang pedesaan Sumatera barat, tetapi juga dapat diambil manfaat dalam perencanaan pembangunan pedesaan Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Sejarah pedesaan dapat menjadi bagian dari *organized intelligence* sumber dari perencanaan perubahan-perubahan daerah pedesaan.

#### VI. METODE PENELITIAN

Pembahasan penelitian yang berjudul "Komersialisasi dan Diferensiasi Sosial Pada Sebuah Desa Perbatasan Sumatera Barat, 1973-1998", akan dilihat dari perspektif historis (Sartono Kartodirdjo; 1992). Untuk mendapat hasil cerita yang bermakna, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan.

Pertama, pengumpulan sumber (heuristik) dilakukan dengan cara pengumpulan sumber lisan dan tulisan. Sumber-sumber itu dipilah ke dalam dua sifat sumber, sekunder dan primer. Pengumpulan sumber dilakukan di Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, Toko Buku, dan koleksi pribadi. Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan cara wawancara metode sejarah lisan. Pendekatan sejarah lisan, dalam batas tertentu memiliki kemampuan dalam menggali ingatan kolektif yang berguna sebagai sumber penulisan sejarah. Lebih jauh sejarah dari bawah (*history from below*) akan dapat diangkat ke permukaan (Willa K. Baum; 1971).

Kedua, adalah kritik sejarah, di mana sumber-sumber diseleksi dan dikritik kebenaran dan keterkaitannya dengan cerita yang akan digambarkan.

Tahap ketiga, interpretasi, yaitu tahap menafsirkan fakta sejarah untuk mendapatkan suatu pengertian, dan kemudian tahap penulisan (historiografi) yaitu menjadikan suatu cerita yang bermakna, integral dan berarti bagi masyarakat.



## VII HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Daerah Perbatasan : Perkembangan Penduduk dan Produksi Perkebunan

Koto Baru terletak di daerah bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat, yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. Daerah pedesaan Koto Baru dilalui oleh jalan lintas Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi. Pada tahun 1969, penduduk Kecamatan Koto Baru berjumlah 19.360 orang. Kepadatan penduduk rata-rata 12 orang per km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 (enam) nagari dan tersebar di sekitar jalan raya propinsi serta jalan kecamatan (lihat tabel 1).

Tabel : 1  
Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk  
Kecamatan Koto Baru Tahun 1969

No	Nama Nagari	Jumlah Penduduk	Luas Km <sup>2</sup>	Kepadatan Penduduk Tiap Km <sup>2</sup>
1.	Koto Baru	5.391	78,80	68
2.	Koto Besar	3.092	496,90	6
3.	Koto Salak	4.591	231,60	20
4.	Sungai Limau	2.208	601,00	3
5.	Sialang Gasang (Gaug)	2.408	179,40	13
6.	Tiumang	1.676	184,40	12
	Jumlah	19.360	1.672,10	12

Sumber:

*Statistik Pertanian Sumatera Barat Tahun 1969*, hal. 25

Setelah kawasan perbatasan propinsi ini menjadi daerah perkebunan, dan lempat bagi transmigrasi dari Jawa, maka penduduk pun bertambah dengan cepat. Pemerintah Kabupaten pada awal tahun 1990 membagi daerah Kecamatan Koto Baru menjadi dua, satu tetap dengan nama Kecamatan Koto Baru dan satunya lagi (pada mulanya hanya Kecamatan Perwakilan Koto Baru) diberi nama Kecamatan Sungai Rumbai (resmi berdiri sendiri tahun 1996). Pada tahun 1989 penduduk Kecamatan Koto Baru berjumlah 35.392. Lima tahun berikutnya mencapai 46.083 jiwa dengan kepadatan penduduk 51 jiwa/km<sup>2</sup> dan tahun 1998 berjumlah 48.373 dengan kepadatan sekitar 54 jiwa/km<sup>2</sup>. Peningkatan jumlah penduduk yang besar, karena sebagian daerah Kecamatan ditempatkan masyarakat transmigran dari Jawa, seperti Koto Salak, Sialang Gaung, dan Tiumang. Sedangkan Sungai Limau dan Koto Besar (lihat tabel 1 di atas) dimasukkan dalam Kecamatan Perwakilan (Sungai Rumbai). Sebelum resmi berpisah, tahun 1993 penduduk kedua kecamatan telah mencapai 76.985 jiwa (Koto Baru 45.523 dan Sungai Rumbai 31.462) (lihat tabel 2).

Tabel : 2  
Perkembangan Penduduk Kecamatan Koto Baru  
Tahun 1989-1998

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1989	17.623	17.769	35.392
1990	17.750	17.680	35.430
1991	18.024	17.404	35.428
1992	22.672	21.634	44.306

1993	23.529	21.994	45.523
1994	23.800	22.283	46.083
1995	24.365	23.146	47.511
1996	24.039	23.872	47.911
1997	24.041	23.878	47.919
1998	24.477	23.896	48.373

Sumber :

Data perkembangan penduduk tidak termasuk data dari Kecamatan Sungai Rumbai. *Kesamatan Koto Baru Dalam Angka 1995 dan Koto Baru Dalam Angka 1999*.

Kondisi jalan negara pada awal orde baru, tepatnya tahun 1969 dari dan ke ibukota Kabupaten amat buruk. Dalam tahun 1969, untuk jurusan Simpang Koto Baru sampai batas Jambi yang berjarak 33 Km bisa dicapai lebih dari sehari. Apalagi kalau sudah perjalanan ke ibukota Propinsi yang berjarak 250 Km rata-rata dicapai dengan kendaraan dua hari dua malam (*Statistik Pertanian Tahun 1969*, hal. 34).

Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dari dahulu memang lebih dikenal sebagai daerah perkebunan. Sampai tahun 1969 dari luas 41.087 ha. Kebun karet rakyat, maka SWL/Sijunjung merupakan penghasil karet dengan jumlah tertinggi, yaitu 8.300 ton. Padahal dari segi luas, kebun karet kawasan ini (7239 ha) hampir sama dengan Kabupaten Pasaman dengan luas 7862 ha.

Tabel : 3  
Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 1969  
(Menurut Kabupaten di Sumatera Barat)

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Agam	242	129
2.	Pasaman	7.862	5.360
3.	Lima Puluh Kota	1.918	956
4.	Tanah Datar	3.939	1.200
5.	Padang Pariaman	966	200
6.	Solok	4.228	1.200
7.	Pesisir Selatan	4.683	400
8.	SWL/Sijunjung	7.239	8.300
	Jumlah	41.087	17.745

Sumber :

*Statistik Pertanian Sumatera Barat Tahun 1969*, hal. 92

Petani memiliki luas lahan karet antara 0,5 hektar sampai 10 hektar (Nopriyasan dan Syafrizal, 1999, 12). Tanaman karet menjadi primadona di pedesaan Koto Baru sejak dibukanya kebun karet baru oleh P3RSB, apalagi setelah berproduksi tahun 1983. Bila tahun 1969 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menghasilkan 8.300 ton, maka tahun 1998 (batasan akhir penelitian) menjadi 24.600 ton (lihat tabel 4).



Tabel : 4  
Produksi Karet Rakyat Kabupaten SWL/Sijunjung Tahun 1969-1998

Tahun	Produksi (ton)
1969	8.300,00
1976	8.102,68
1977	7.361,88
1981	10.062,00
1982	10.053,00
1983	12.266,00
1984	14.174,00
1985	14.915,40
1986	15.559,70
1987	15.992,00
1989	17.599,00
1990	18.476,00
1991	18.752,00
1992	19.642,00
1993	19.869,00
1994	21.762,00
1995	22.476,75
1996	25.905,00
1997	21.500,00
1998	24.600,00

Sumber :

*Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka Tahun 1976, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, dan 1998. Kecuali Tahun 1969 diambil dari Statistik Pertanian Sumatera Barat Tahun 1969. Data tahun 1970-1975, 1978-1980, 1988 belum tercover di tabel.*

Separah dari produksi karet kabupaten berasal dari daerah bagian Selatan, khususnya dari Kecamatan Koto Baru. Pada tahun 1987, produksi karet Kabupaten adalah 15.992.00 ton, sedangkan dari Koto Baru berjumlah 8.262,10 ton. Pada masa akhir pemerintahan orde baru (1998), hasil karet Koto Baru adalah 12.112,00 ton, yang berarti tetap sebagai penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah (tabel 5)

Tabel : 5  
Perbandingan Produksi Karet Kecamatan Koto Baru dengan Produksi Karet Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1987-1998 (Produksi/ton)

No.	Tahun	Kec. Koto Baru	Kab. SWL/Sijunjung
1.	1987	8.262,10	15.992,00
2.	1993	10.718,00	19.869,00
3.	1995	13.413,25	22.476,25
4.	1996	14.323,00	25.905,00
5.	1998	12.112,00	24.600,00

Sumber :

*Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka Tahun 1987, 1993, 1995, 1996, dan 1998. Sejak tahun 1985, Kecamatan Koto Baru dibagi menjadi dua, yaitu Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sei Rumbai, yang sebelumnya masih bersifat perwakilan. Oleh sebab itu data tahun 1996 dan 1998 dari kedua daerah tersebut. Data tahun 1988-1992 dan 1994 belum tercover.*



Tinggi rendah produksi karet, amat tergantung kepada penanaman luas tanaman, pematangan karet, cuaca atau jumlah hari hujan pada tahun tersebut, di samping adanya kebun rakyat yang terbakar, baik kesalahan manusia, atau pun karena panas terik matahari. Menurut Burhanuddin, setiap tahun berjalan, bila musim kemarau agak panjang, maka ada saja kebun petani yang terbakar (*Burhanuddin, Wawancara 20 Agustus 2001*). Di samping itu ada juga produksi karet rakyat yang tidak sempat masuk buku karena diperdagangkan langsung oleh pedagang lokal ke Padang dan Jambi. Untuk daerah Kecamatan Koto Baru saja, versi M.Yusuf, ada sekitar 40 ton per minggu atau rata-rata sebulan 1.600 ton. Dengan demikian hasil karet setahun bisa mencapai 19.200 ton (*M. Yusuf, Wawancara tanggal 12 September 2001*).

#### B. Tanah dan Penguasaan Tanah : Dasar Diferensiasi

Sebelum dikembangkan menjadi daerah perkebunan rakyat dibawah binaan pemerintah, penguasaan tanah di Kecamatan Koto Baru sebagian besar masih bersifat komunal. Pemilikan komunal dapat dilihat dalam berbagai bentuk, ada yang digolongkan tanah ulayat dalam arti yang sesungguhnya masih ada. Artinya tanah ini dapat dimiliki secara bersama (kolektif) antara kaum kerabat dan penghulu yang ada dalam nagari. Pengawasan tanah ulayat tersebut berada di bawah kendali Kepala Nagari (Wali Nagari), sehingga pendistribusian kepada anak kemenakan harus atas izin Wali Nagari (*Nasir, Wawancara 20 Agustus 2001*).

Setiap nagari di Minangkabau, juga mempunyai tanah hutan, yang disebut hutan nagari. Biasanya tanah hutan yang belum diolah tetap digolongkan kepada tanah ulayat nagari. Akan tetapi bila hutan itu terletak dalam suatu wilayah kaum, maka menjadi hak milik komunal kaum, yang disebut ulayat kaum. Atas dasar itu pula ada tanah ulayat yang dibagi kepada anggota kaum atau dimanfaatkan oleh anggota kaum atas izin atau persetujuan penghulu kaum. Bila terjadi konflik, maka penghulu, dan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berusaha menyelesaikannya (*Mashuri Dt. Bundo Rajo, Wawancara 21 Agustus 2001*). Bagaimanapun tanah sejak awal menjadi dasar diferensiasi sosial di pedesaan Minangkabau, bukan saja dari hak milik tanah, tetapi juga dari kepemilikan Rumah Gadang, emas dan permata, dan hak gelar (penghulu) (*Eltzabeth E. Graves, 1985, 26-34*).

Kepemilikan tanah secara individual dapat diperoleh dengan cara warisan dari tanah pusaka kaum, seperti sawah, ladang, kebun, dan tanah untuk perumahan yang didiami suatu keluarga. Tanah itu, meskipun sudah diperuntukkan, sesungguhnya secara moral etika (adat) tidak bisa diperjualbelikan, kecuali dalam keadaan tertentu.<sup>1</sup> Kemenakan yang berhak menerima tanah jenis ini hanya dari garis keturunan perempuan. Pada umumnya pembukaan "kebun baru" dilakukan pada kawasan hutan konversi atau lahan rakyat yang sudah ditanami dengan tanaman perkebunan oleh anak kemenakan nagari. Tentu saja hal ini menguntungkan anggota keluarga kaum yang sudah mendapat hak peruntukan sebelumnya, sehingga penguasaan mereka atas tanah tersebut menjadi besar, karena sudah atas nama mereka sendiri.

Penguasaan tanah secara komunal tidaklah menjamin tanah desa yang sama atas penduduknya. Akses penduduk terhadap tanah amat tergantung dari kategori apakah dia termasuk *urang asa* atau tidak. *Urang asa* menguasai tanah yang besar. Ketidak merataan ini tentu saja mencerminkan perbedaan sosial pada masa sebelum orde baru. Perbedaan sosial ini juga dapat dilihat dari kecenderungan dari sebagian kemenakan yang mewarisi tanah kaumnya yang terpaksa melepaskan tanah kepada

<sup>1</sup> Misalnya untuk bisa menjual dan menggadaikan harta pusaka haruslah terlebih dahulu memenuhi satu dari beberapa syarat berikut : Mayat terbuang di atas rumah, Gadis besar belum beruami, Rumah Gadang ketrisan, dan membangkit batang terendam (*AA Navis, 1984, 165*).



penduduk desa yang lebih mampu, baik karena terjerat utang dan atau untuk kepentingan lainnya (Wawancara dengan M. Lubis, 12 September 2001). Atas kondisi itu pula dapat dikatakan bahwa kepemilikan tanah di Minangkabau sesungguhnya menunjuk kepada status atau kedudukan sosial ekonomi, dan atau asal usul suku (AA Navis, 1984, 150). Dengan demikian tanah bagi orang Minangkabau dalam arti tertentu juga menjadi dasar bagi diferensiasi sosial di dalam masyarakat (Akira Oki, 1977, 105).

Kepemilikan pribadi bagi warga desa diperoleh melalui usaha dengan mata pencaharian sendiri. Sebelumnya sistem ini tidaklah begitu dikenal dalam struktur masyarakat Minangkabau, namun seiring dengan semakin kuatnya peran keluarga inti (ayah, ibu dan anak) cara kepemilikan ini diakui keberadaannya. Gejala ini terlihat semakin jelas sejak tahun 1970-an.

Pembukaan daerah perbatasan Koto Baru menjadi daerah perkebunan, sekaligus mempercepat perubahan struktur pertanahan masyarakat pedesaannya. Tanah menjadi hak milik pribadi petani, yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Itulah sebabnya pemerintah berusaha kembali meredistribusikan tanah (*landreform*) kepada petani. Masing-masing petani memperoleh satu kapling kurang lebih 3 hektar.

### C. Polarisasi Masyarakat Perkebunan : Komersialisasi dan Diferensiasi

Polarisasi masyarakat perkebunan terlibat dari munculnya kelas petani kaya komersial dan golongan proletar tanpa tanah. Produksi kebun rakyat memang meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 4 dan 5), dan masyarakat petani muncul sebagai petani yang "rasional", namun bersamaan dengan itu terjadi ketidak merataan dalam penghasilan. Para petani pemilik tanah kebun menjadi "orang beruntung" yang cenderung "melupakan" mekanisme pemerataan tradisional pedesaan.

Pada tahun 1998, petani proyek mendapat penghasilan bersih dari kebun karetinya dalam setahun sebesar Rp 5.206.500,- (tertinggi) dan Rp 1.798.000,- (terendah). Keadaan itu berarti rata-rata pendapatan petani setahun adalah Rp 3.343.127,-. Produksi per kapling berkisar 600 kg per bulan, bahkan ada yang mencapai 960 kg per bulan. Harga getah karet sebelum krisis moneter 1998, adalah antara Rp 600,- sampai Rp 850,-. Dapat diperkirakan bila dalam satu keluarga mereka dapat satu atau lebih kebun karet, maka pendapatan petani menjadi berlipat ganda. Apalagi jumlah hari dan jam kerja petani hanya 3-4 jam per hari, dengan hari kerja 6 hari, sehingga waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk usaha lain (Nopriyaman dan Syafrizal, 1999, 41).

Dalam mekanisme pemerataan tradisional Minangkabau, segala hasil yang dihasilkan dari tanah pusaka sebenarnya dibagi sesama keluarga segaris keturunan atau "parnik". Akan tetapi dengan diberikannya hak kepemilikan individu atau sertifikat oleh pemerintah, tanah kebun ini menjadi hak penuh bagi pemilik sertifikat. Hasil penelitian menunjukkan jarang pemilik kebun baru berbagi hasil kebunnya antara sesama anggota keluarga kaum yang sebenarnya juga berhak. Ketidakpuasan anggota kaum yang tidak mendapat hak pembagian ini, berimplikasi kepada ketidakediaan mereka menandatangani surat-surat permohonan yang diperlukan petani peserta, khususnya bila tanah itu berasal dari harta pusaka tinggi (*Laporan Tahunan 1985, hal. 52*). Ada pula Sang maniak yang seharusnya sebagai pengawas, muncul sebagai penguasi kebun bagi kepentingan hidup anak istrinya sendiri (Hyas Ibrahim, Wawancara tanggal 19 September 2001). Lebih jauh mengakibatkan terjadinya hubungan kerja yang bersifat bisnis, dengan sistem upahan atau bagi hasil



antara anak kemenakan, bahkan dengan warga pendatang luar desa (*Barhanuddin, Wawancara tanggal 20 Agustus 2001*).

Menurut Uni Cap, program modernisasi karet rakyat ini telah membawa lahirnya bentuk diferensiasi sosial baru sesama warga desa, seperti petani pemilik tanah kebun dan petani pekerja (buruh tani) yang tidak punya tanah dan yang sedikit punya tanah (*Uni Cap, Wawancara tanggal 12 September 2001*). Di samping itu, tidak pula semua petani yang tidak punya tanah tertampung bekerja di kebun pemilik. Hal ini disebabkan karena sebagian pemilik kebun, sekaligus juga petani penyadap.

Bentuk diferensiasi sosial tersebut menunjukkan munculnya pola baru dalam hubungan masyarakat, yaitu "kapitalisme pertanian", yang ditandai oleh hubungan produksi berdasarkan "kapitalisme". Artinya ketika ada diferensiasi sosial masyarakat pedesaan dan upah kerja yang mengikutinya, maka disitu ada "kapitalisme". Diferensiasi menuju kepemilikan tanah itu juga menunjuk semakin meningkatnya status petani, karena terbuka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan uang yang tidak sedikit. Situasi ini memungkinkan pula mereka menjadi kelompok kaum "berpunya" baru pedesaan (*Rotna, Wawancara tanggal 12 September 2001*).

Masalah yang timbul dari keberhasilan daerah perbatasan bagian selatan Sumatera Barat menjadi daerah perkebunan terlihat dari munculnya berbagai kecemburuan "psikologis". Hal ini disebabkan, beragamnya luas areal lahan yang dimiliki oleh petani. Di samping itu lokasi lahan yang dimiliki petani mempunyai tingkat asebilitas yang berbeda (*Syofyan, Wawancara tanggal 19 September 2001*).

Petani yang sebelum dibukanya kebun karet di bawah binaan P3RSB tahun 1973 telah memiliki kebun yang luas, merasa "iri" kepada petani yang memiliki lahan sempit atau yang tidak memiliki lahan. Hal ini disebabkan setelah menjadi petani peserta proyek, mereka mempunyai hak yang sama dengan pemilikan kebun seluas kurang lebih 2 ha. Mereka kecewa karena ada petani yang tiba-tiba mendapatkan lahan, dan juga kecewa karena tempat lahan berada jauh di pelosok.

Danfak perkebunan bagi pengembangan wilayah adalah dibaginya daerah Kecamatan Koto Baru menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu : Koto Baru dan Sei Rumbai pada tahun 1996. Sebagai ibukota kecamatan, Koto Baru menjadi pusat perdagangan dan uang beredar, pusat segala aktifitas ekonomi, pasar terus berkembang dan banyaknya pedagang luar daerah yang datang ke wilayah ini.

Pasar-pasar tidak saja melayani kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat *hinterlandnya*. Ada 8 pasar sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat (Abai Siat, Ampalu, Ampang Kuranji, Sei Rumbai, Pasar Koto Baru, Siulang Gaung, dan Batu Kangkung. Perbankan juga cukup maju, dengan adanya 3 Bank, yaitu Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Koto Baru, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa Koto Baru, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sei Rumbai. Disamping itu daerah Koto Baru memiliki 25 Koperasi unit Desa dengan jumlah anggota 10.003 orang, dan 4 Non-KUD dengan anggota 585 orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa koperasi yang mereka miliki terbesar dari kecamatan-kecamatan lainnya. Begitu juga Kantor Pos berjumlah 2 buah, yang terletak di Koto Baru dan Sei Rumbai. Indikator kemajuan ekonomi lainnya adalah telah terpasangnya jaringan telepon di daerah pedesaannya dengan kapasitas 710 buah (*Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. SWL/SJJ Tahun 1995/1996*).



#### D. Kesimpulan

Pembangunan sektor perkebunan pada awal tahun 1970-an di kawasan perbatasan Sumatera Barat merupakan contoh historis. Bagi Masyarakat Koto Baru produksi karet mereka meningkat cukup drastis, lewat tata budi daya dan bibit unggul, dan pemakaian pupuk bagi kebun karet mereka. Ekses dari keberhasilan pembangunan, dan lancarnya kontak daerah pedesaannya dengan kota, maka mulai dirasakan semakin “mengkotanya pedesaan” Koto Baru. Proses globalisasi tersebut, sekaligus meluaskan gejala diferensiasi dan komersialisasi terus akan mengubah kota-kota menjadi suburban.

#### E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada pimpinan Fakultas Sastra Universitas Andalas atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada lembaga Penelitian Universitas Andalas yang telah menyediakan dana secukupnya untuk terselenggaranya penelitian. Terakhir kepada staf perpustakaan Fakultas Sastra dan Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, serta semua pihak yang turut membantu kelancaran penelitian diucapkan terima kasih. Kami menyadari tulisan ini belumlah sempurna, untuk itu kritik dan saran membangun akan kami terima dengan lapang dada, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Dokumen Tercetak

- Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II SWL/Sijunjung*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1999 Muaro Sijunjung; 1995/1996
- Koto Baru Dalam Angka Tahun 1994*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1995
- Koto Baru Dalam Angka Tahun 1999*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 2000
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1977*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1998
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1987*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1988
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1991*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1992
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1993*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1994
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1994*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1995



- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1995*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1996
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1996*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1997
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1997*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1998
- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 1998*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1999
- Laporan Tahunan 1985*. Padang : Pemerintah Propinsi Dati I Sumatera Barat Dinas Perkebunan, 1986
- Statistik Pertanian Sumatera barat Tahun 1969*. Padang: Perwakilan Departemen Pertanian, 1971.
- Sungai Rumbai Dalam Angka Tahun 1999*. Muaro Sijunjung: Bappeda Tk. II Sawahlunto/Sijunjung dan BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 2000

## B. Buku dan Laporan Penelitian

- A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984
- Bann, Willa K., *Oral History for the Local Historical Society*. Nashville, Tennessee: American Association for State and Local History, 1971
- Burger, D.H., *Desa Ngablak (Kabupaten Pati) pada tahun 1869 dan 1928*.
- Husken, Frans, *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980* (Jakarta: Grasindo, 1998).
- Kano, Hiroyosi, Frans Husken dan Djoko Surjo (Eds.), *Di Bawah Asap Pabrik Gula : Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Nopriyusman, et.al., "Koto Baru : Dinamika Masyarakat Desa Frontier di Sumatera Barat, 1970-1995", *Laporan Penelitian*. (Padang: Lembaga Penelitian Unand, 1997
- dan Syafrizal, "Karet dan Kaum Pedagang : Produksi Pertanian dan Perdagangan di Daerah Batas Sumatera Barat, 1974-1994", *Laporan Penelitian Dosen Muda*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1999.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992



- Oki, Akira, "Social Change in the West Sumatran Village 1908-1945", *Thesis Doctoral*, Canberra: The Australian University, 1977.
- Graves, Elizabeth, *Reaksi Minangkabau Terhadap Ekstremisme Belanda Abad 19* (Terjemahan Mestika Zed). Padang: Ditbidlitabmas, Dep. P dan K, 1985.